

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pengalaman hasil dari pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman ataupun keterampilan tertentu. Pendidikan dapat diperoleh secara formal dan informal. Secara formal pendidikan dapat didapatkan di lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah (negeri) maupun swasta. Di negara Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”, disini dapat dilihat pentingnya pendidikan bagi sebuah negara. Karena pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga sebagai pemotong rantai kemiskinan.

Tidak terkecuali terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Selama ini, anak berkebutuhan khusus (ABK) selalu dipisahkan dengan dimasukkan ke dalam pendidikan khusus yang tentunya berbeda dengan anak normal lainnya. Namun, hal ini menjadikan adanya suatu jurang yang memisahkan antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal (Pratiwi, 2015, hlm.237). Interaksi sosial dari anak berkebutuhan khusus dengan lingkungannya menjadi terhambat. Sehingga masyarakat tidak terlalu akrab dengan kelompok anak berkebutuhan khusus. Hal ini juga menjadikan anak berkebutuhan khusus dirasa dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat.

Pada saat ini telah diusung suatu konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak, bahkan anak berkebutuhan khusus. Konsep tersebut dikenal dengan pendidikan inklusif, yaitu tentang menyediakan lingkungan belajar yang optimal untuk setiap siswa dan mengurangi hambatan belajar (Forlin, 2012; Tiemann, 2018; dalam Braksiek, 2021). Di Indonesia juga, pendidikan inklusif bukan merupakan hal asing karena telah dibahas dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya pada pasal 5 ayat 2 yang memberikan penjelasan bahwa setiap warga

negara indonesia dengan kelainan, baik dalam hal fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional juga mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan. Undang-undang ini secara jelas menerangkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak serta kesempatan yang sama dengan siswa normal lainnya dalam memperoleh pendidikan di sekolah reguler.

Pendidikan inklusif juga pada tingkat dunia telah dibahas dalam beberapa dokumen dan kesepakatan internasional yaitu diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994 dan *Convention on the Right of Person with Disabilities and optional Protocol* 2007. Hal ini membuktikan dunia sebenarnya sudah mengakui hak bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dimana saja dan bergaul dengan siapa saja. Namun, hanya tinggal usaha dari tiap negara untuk tetap memperjuangkan hak warganya yang berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah di sekolah reguler bersama dengan anak normal lainnya.

Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Dermawan, 2013, hlm.887). Dapat dicermati bahwa Anak Berkebutuhan Khusus tidak selalu identik dengan kekurangan fisik, tetapi juga dengan anak yang terlihat normal namun menderita Disleksia (kesulitan mengenal huruf dan angka), anak hiperaktif, kesulitan belajar, dan susah konsentrasi. Setiap anak yang berkebutuhan khusus (ABK) memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap jenis ketunaannya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada mereka akan berbeda dibandingkan dengan anak normal lainnya karena disesuaikan dengan jenis ketunaan yang diderita oleh anak tersebut.

Menurut data yang dihimpun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Kemdikbud Ristek dari Dapodik memperlihatkan bahwa per September 2021, jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) jenjang SD

berjumlah sebanyak 17.134 sekolah dengan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah di sekolah tersebut yaitu 57.155 siswa. Dengan persentase pada masing- masing ketunaan yaitu Kesulitan Belajar 33,80%, Tuna Netra 16,13%, Hiperaktif 7,65%, Tuna Grahita Ringan 6,09%, Autis 5,45%, Cerdas Istimewa 5,14%, Campuran 5,10%, Tuna Wicara 4,23%, Tuna Grahita Sedang 3,85%, Tuna Rungu 3,01%, Bakat Istimewa 2,48%, Tuna Daksa Ringan 2,24%, Tuna Daksa Ringan 2,13%, Down Syndrome 1,54%, dan Tuna Laras 1,15% (Ditpsd, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sudah berjalan di Indonesia.

Pendidikan Jasmani Adaptif sebagai bagian integral dari pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas tanpa memandang keterbatasan fisik yang dimiliki peserta didik. Pendidikan Jasmani inklusif merupakan pengalaman pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan siswa berkebutuhan khusus dengan rekan sebaya mereka dalam pengaturan pendidikan jasmani umum (Block & Obrusnikova, 2007; Hodge dll, 2013; dalam Yarimkaya & Rizzo, 2020, hlm. 27). Memasukkan siswa berkebutuhan khusus secara efektif dalam pendidikan jasmani sangat penting untuk pencapaian siswa tersebut secara sosial, fisik, dan akademik (Pocock dan Miyahara, 2018, hlm.763).

Kenyataan yang berada di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi banyak kendala. Kendala yang dimaksud yaitu diantaranya sarana dan prasarana, ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), dan kesiapan guru dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Kendala-kendala ini sudah seharusnya dapat dikurangi agar pendidikan inklusi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan anak-anak berkebutuhan khusus dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler bersama dengan anak-anak normal lainnya. Salah satu komponen pendidikan inklusi yang sangat perlu dipersiapkan adalah guru. Guru merupakan orang yang berinteraksi langsung dengan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Guru jugalah yang memiliki tanggung jawab besar agar semua siswa dapat merasakan pelayanan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Guru pendidikan jasmani umumnya memiliki keyakinan dan sikap yang baik terhadap pengajaran ABK, tetapi merasa tidak siap

atau tidak mampu mengajar mereka dengan benar karena kurangnya dukungan administratif, kurangnya pengalaman mengajar, pelatihan yang tidak memadai dan persiapan akademik dan peralatan yang buruk atau tidak memadai. dan fasilitas (Hodge dkk., 2004; Obrusnikova, 2008; Ozer dkk., 2013; Yamrikaya & Rizzo, 2020).

Di Kota Bandung, peraturan mengenai pendidikan inklusi disinggung dalam Perwal No.610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Dan Sekolah/Madrasah. Ditambah dengan hasil wawancara yang dilansir dalam MerahPutih.com mengenai anak berkebutuhan khusus. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Cucu Saputra, mengemukakan bahwa semua sekolah yang berada di Kota Bandung sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi, sehingga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan anaknya di sekolah mana saja yang terdekat dengan rumahnya. Namun dengan catatan pada saat mendaftar diharuskan melampirkan surat rekomendasi dari asesor melalui *Assessment Center* Dinas Pendidikan Kota Bandung (Ramdani, 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka timbul pertanyaan mengenai kesiapan guru penjas reguler di kota Bandung khususnya, dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler berdasarkan instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah. Mengingat bahwa anak berkebutuhan khusus perlu diberikan pelayanan yang sesuai dengan jenis ketunaan yang dialaminya. Lalu, layanan tersebut haruslah berdasarkan pada kompetensi dan keterampilan guru yang mumpuni mengenai pendidikan inklusif dan penanganan anak berkebutuhan khusus. Rendahnya kompetensi guru dalam memahami konsep pendidikan inklusif membuat guru perlu mendapatkan peningkatan pemahaman mengenai pendidikan inklusif yang sesuai dengan prosedur pendidikan, lalu kompetensi yang dimiliki nantinya harus diakui oleh pendidik karena dengan kompetensi yang baik guru akan dapat mengembangkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang seharusnya (Irdamurni dalam Putri dan Nurhastuti, 2021)

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya bersedia untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Slameto dalam Effendi, 2017, hlm.18). Kesiapan menjadi sangat penting terkhusus

dalam proses pembelajaran bahkan perlu diperhatikan juga faktor yang mempengaruhi kepuasan tersebut. Karakteristik yang berbeda dari setiap ketunaan membuat strategi pembelajaran yang digunakan akan berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis ketunaan. Hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran dengan konsep pendidikan inklusif yaitu kesiapan pengetahuan, keterampilan serta sikap. Terlebih lagi bagi guru pendidikan jasmani yang lebih banyak melakukan pembelajaran di luar ruangan sehingga lebih sulit dalam melakukan pengelolaan kelas. Sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan jasmani karena mereka yang berkebutuhan khusus tidak bisa selalu disama ratakan dengan siswa biasa. Semua hal tersebut dapat berjalan lancar jika kesiapan guru sangat tinggi terhadap pengajaran siswa berkebutuhan khusus.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmathul Putri pada tahun 2021 mengenai kesiapan guru mengelola kelas dalam mata pelajaran pendidikan jasmani di SMK Negeri penyelenggara pendidikan inklusi se-Kota Padang mendapatkan hasil bahwa kesiapan pengelolaan kelas yang bersifat fisik masih dirasa kurang, dan juga untuk kesiapan pengelolaan secara non-fisik masih dirasa belum bisa untuk dapat dikatakan baik. Sehingga pengelolaan kelas inklusi baik secara fisik maupun non-fisik di SMK penyelenggara inklusi se-kota Padang masih dirasa kurang baik. Penelitian lainnya yang membahas mengenai kesiapan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Puspitasari pada tahun 2019. Pada penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda yaitu keseluruhan guru SMP penyelenggara pendidikan inklusi di kota Surabaya telah cukup siap.

Dilihat berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kesiapan Guru Pendidikan Jasmani dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Siswa Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusi”. Dengan adanya penelitian ini diharapkan orangtua siswa yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK), guru, kepala sekolah beserta para pemangku kebijakan dapat mengetahui kesiapan guru penjas dalam mengajar siswa penyandang disabilitas di sekolah dasar (SD) negeri penyelenggara pendidikan inklusi, sehingga dapat menjadi bahan untuk evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi khususnya di Kota Bandung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan di dalam latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana kesiapan guru pendidikan jasmani dalam pelaksanaan proses belajar mengajar siswa disabilitas di sekolah dasar inklusif?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui kesiapan guru penjas dalam pelaksanaan proses belajar mengajar siswa disabilitas di sekolah dasar inklusif.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat dalam segi teori, kebijakan, praktik dan sosial.

1.4.1. Manfaat segi teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan serta memberikan sumbangan bagi lembaga pendidikan berupa kondisi nyata kesiapan guru yang ideal dalam penyelenggaraan kelas inklusif khususnya pendidikan jasmani inklusif.

1.4.2. Manfaat segi kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi lembaga pendidikan dalam membuat kebijakan strategis terkait penyelenggaraan pembelajaran inklusi yang melibatkan berbagai komponen seperti diantaranya kepala sekolah, guru, kurikulum, sarana prasarana, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak normal.

1.4.3. Manfaat segi praktik

1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan serta informasi baru mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Bagi guru PJOK, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran guru dalam bersikap terhadap anak berkebutuhan khusus, serta menjadi bahan koreksi untuk pengembangan proses pendidikan inklusi.

1.4.4. Manfaat segi sosial

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi orang tua, guru, dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembelajaran pendidikan jasmani inklusif yang melibatkan anak berkebutuhan khusus (ABK).

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis oleh penulis berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3260/UN40/HK/2019 tentang “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019”, dimulai dengan bab pertama dan diakhiri bab kelima yaitu sebagai berikut:

1.5.1. BAB I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai dengan struktur dari skripsi secara garis – garis besar.

1.5.2. BAB II Kajian Pustaka

Merupakan pembahasan mengenai kajian konsep dan teori. Dalam bab ini dideskripsikan secara mendalam mengenai landasan teori yang berkaitan dengan isi penelitian.

1.5.3. BAB III Metode Penelitian

Merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan penelitian karena menjadi suatu acuan. Pada bab ini diuraikan tentang setting penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1.5.4. BAB IV Temuan dan Pembahasan

Merupakan bab inti, karena pada bab ini membahas mengenai pengolahan data dan analisis data mengenai hasil penelitian yang akan dipaparkan dan pembahasan tentang hasil pengolahan dan analisis data.

1.5.5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan serta mengemukakan implikasi dan rekomendasi yang berhubungan dengan objek penelitian untuk dijadikan referensi bagi pihak yang berkepentingan.